

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KELURAHAN PARUNG JAYA KECAMATAN KARANG TENGAH KOTA TANGERANG

Muhammad Iqbal Maulana¹, Rachmat Gustiana², Suwandi³

^{1,2,3}Universitas Yuppentek Indonesia

Email: babangqibol@gmail.com¹, rgustiana08@gmail.com², suwandi@uyi.ac.id³.

ABSTRAK

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah Apakah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Di Kelurahan Parung Jaya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang telah berbasis partisipasi masyarakat, dan bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Parung Jaya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan melalui proses wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada informan. Temuan hasil penelitian ini yaitu dari indikator partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kelurahan pada tahap assessment, tahap perencanaan alternatif, tahap pelaksanaan program, dan tahap evaluasi. Hasil penelitian adalah pada tahap assessment terlihat partisipasi masyarakat dapat dikatakan baik yakni masyarakat telah peka terhadap fenomena serta realita yang sedang terjadi disekitar mereka. Pada tahap perencanaan alternatif program melakukan penggalian gagasan yang mendalam dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan agar semua kebutuhan masyarakat dapat tertampung semua. Pada tahap pelaksanaan bisa dikatakan pemerintah berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada tahap evaluasi masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sudah sangat baik, mereka ikut menikmati serta menjaga hasil-hasil pembangunan.

Kata kunci : Partisipasi Masyarakat, Perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten.

ABSTRACT

The main problem in this study is whether the development planning carried out in Parung Jaya Village, Karang Tengah District, Tangerang City has been based on community participation, and aims to determine community participation in development planning in Parung Jaya Village, Karang Tengah District, Tangerang City. In this study using qualitative research methodology through the process of interview and observation. Interviews are conducted by way of direct questioning and answering to informants. The findings of this study are from indicators of community participation in village development planning at the assessment stage, alternative planning stage, program implementation stage, and evaluation stage. The results of the study are that at the assessment stage, it can be said that community participation can be said to be good, namely the community has been sensitive to the phenomena and realities that are happening around them. At the alternative planning stage, the program explores in-depth ideas by involving the community as a whole so that all community needs can be accommodated. At the implementation stage, it can be said that the government has succeeded in increasing public participation. At the stage of community evaluation of the government in the implementation of development has been very good, they participate in enjoying and maintaining the results of development.

Keywords : Community Participation, Development planning, District Government.

PENDAHULUAN

Pembangunan dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama, menciptakan iklim saling menguntungkan antara

keduanya. Dengan demikian, masyarakat dapat mencapai tujuan mereka, sementara pemerintah dapat melaksanakan pembangunan yang tepat sasaran. Untuk mewujudkannya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diperlukan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 ayat 21. Musrenbang merupakan forum antar pelaku yang bertujuan menyusun rencana pembangunan daerah dan nasional. Pelaksanaan Musrenbang dimulai dari tingkat terkecil, yaitu Desa/Kelurahan, kemudian melibatkan tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, hingga mencapai tingkat Nasional. Dengan pendekatan berjenjang ini, diharapkan Musrenbang dapat meresap aspirasi masyarakat dan melibatkan mereka secara aktif dalam proses pembangunan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatakan bahwa pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah menggunakan rencana pembangunan sebagai satuan tindakan untuk menghasilkan rencana pembangunan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang. Oleh karena itu, perkumpulan kelompok masyarakat dipandang sebagai cara pandang penting yang sedang dikembangkan untuk mengatur agar pendekatan-pendekatan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan daerah setempat dan akan lebih terarah. Dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan, partisipasi masyarakat dianggap sebagai proses mobilisasi. Selain melibatkan masyarakat dan pemerintah, kedua belah pihak akan berkolaborasi dalam penyusunan rencana sehingga menghasilkan perencanaan yang efektif ketika ikut serta dalam perencanaan pembangunan. (Rahman & Nurfatimah, 2016:28).

Tjokroamidjojo (1995:43) menyimpulkan bahwa pembangunan nasional dapat diartikan sebagai: (1) suatu proses pembangunan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan, termasuk yang bersifat sosial, ekonomi, politik, dan lainnya; (2) suatu proses perubahan sosial yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan keadilan dalam masyarakat; (3) suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh, untuk, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Dengan demikian, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu acara publik yang sangat penting. Melalui Musrenbang, para pemangku kepentingan dapat memahami isu-isu dan permasalahan yang ada di daerah, mencapai kesepakatan mengenai prioritas pembangunan,

dan mencapai konsensus untuk menyelesaikan berbagai masalah pembangunan daerah. Musrenbang juga berfungsi sebagai platform untuk mensinkronkan pendekatan "top-down" dengan pendekatan "bottom-up," yaitu penilaian kebutuhan masyarakat (community need assessment) dengan penilaian yang bersifat teknis (technical assessment).

Selain itu, Musrenbang juga membantu dalam menyelesaikan konflik yang muncul antara berbagai kepentingan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan non-pemerintah terkait pembangunan daerah. Musrenbang juga menjadi sarana untuk menyelaraskan kebutuhan program pembangunan dengan ketersediaan dana dan kendala-kendala pendanaan, serta untuk mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, sebagai kontribusi informasi bagi semua pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan di daerah, pada kesempatan ini akan dilakukan penelitian terkait pelaksanaan proses perencanaan pembangunan di wilayah Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang. Pemilihan lokasi ini tidak hanya didasarkan pada keterbatasan waktu dan tenaga, tetapi juga karena kecamatan ini menunjukkan heterogenitas yang signifikan, baik dari segi latar belakang profesi, suku, agama, maupun tingkat pendidikan, dibandingkan dengan kelurahan lainnya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, permasalahan yang dapat diajukan adalah: "Bagaimana pelaksanaan proses perencanaan pembangunan di Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, dengan mempertimbangkan partisipasi masyarakat sebagai basisnya?"

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan definisi partisipasi menurut Keith Davis dalam Santoso Sastropoetro (1988:18), partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan mental, pikiran, moral, atau perasaan seseorang dalam konteks kelompok. Ini mendorong individu untuk memberikan kontribusi kepada kelompok dengan tujuan mencapai suatu tujuan bersama, serta ikut bertanggung jawab terhadap upaya yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Penting untuk dicatat bahwa partisipasi dalam konteks ini tidak hanya berfokus pada keterlibatan fisik dalam pekerjaan, melainkan lebih pada keterlibatan diri seseorang yang memunculkan rasa tanggung jawab dan kontribusi yang signifikan terhadap kelompok.

Sejalan dengan pendapat di atas, Gordon W. Allport (dalam Santoso Sastropoetro, 1988:71) menyatakan bahwa, "Seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, dengan keterlibatan dirinya berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya." Dengan merujuk pada pernyataan tersebut, terdapat tiga unsur penting dalam konsep partisipasi:

1. Partisipasi melibatkan keterlibatan mental dan perasaan seseorang, lebih dari sekadar keterlibatan fisik atau pelaksanaan tugas semata.
2. Keterlibatan diri individu merupakan inti dari partisipasi, menunjukkan bahwa keterlibatan tersebut lebih dari sekadar tindakan fisik atau pekerjaan, melibatkan aspek mental dan perasaan individu.
3. Partisipasi mencakup keterlibatan pikiran dan perasaan, menekankan bahwa kontribusi individu bukan hanya bersifat mekanis atau rutin, tetapi juga melibatkan pemikiran dan emosi yang mendalam.

Rumusan FAO di atas menyoroti pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan, dengan asumsi bahwa masyarakat harus memiliki peran yang signifikan dalam memajukan dirinya sendiri. Agar hal ini tercapai, penting bagi masyarakat memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan pihak terkait. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi suatu elemen penting dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan yang dilaksanakan. Dalam menyadari bahwa peran masyarakat sangat penting dalam perencanaan pembangunan, diakui bahwa kemampuan masyarakat secara umum masih relatif terbatas. Masyarakat seringkali kesulitan untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu, diperlukan diskusi intensif antara berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk unsur pemerintah, akademi, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha terkait. Hal ini bertujuan untuk saling melengkapi informasi dan menyamakan persepsi tentang kebijakan yang akan diambil oleh aparat pemerintah.

Pusic (dalam Adisasmita, 2001:15) menekankan bahwa perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan yang hanya ada di atas kertas. Artinya, keberhasilan perencanaan pembangunan tidak hanya tergantung pada dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat terlibat dan aktif dalam proses perencanaan tersebut. Tanpa partisipasi

masyarakat, rencana pembangunan cenderung tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi riil masyarakat yang akan menjadi subjek utama dari pembangunan tersebut.

Menurut Cohen & Uphoff (dalam Komarudin, 1997:28), terdapat tiga tipe partisipasi masyarakat dalam pembangunan:

1. Partisipasi dalam membuat keputusan: Masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, seperti membuat pilihan dari berbagai kemungkinan dan menyusun rencana-rencana yang dapat dioperasikan, dilaksanakan, dan layak dioperasionalkan.
2. Partisipasi dalam implementasi: Masyarakat memberikan kontribusi sumber daya, administrasi, dan koordinasi kegiatan yang melibatkan tenaga kerja, biaya, dan informasi.
3. Partisipasi dalam kegiatan yang memberikan keuntungan: Masyarakat terlibat dalam kegiatan yang memberikan keuntungan, baik itu keuntungan material, sosial, atau personal. Ini juga melibatkan partisipasi dalam kegiatan evaluasi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Adapun bentuk-bentuk keikutsertaan masyarakat atau kelompok dapat dibagi menurut Vaneklasen & Miller (dalam Handayani, 2006:5):

1. **Partisipasi Simbolis:** Individu duduk pada landasan yang sebenarnya tanpa melalui proses pengambilan keputusan politik dan tidak mempunyai kekuasaan yang sejati.
2. **Partisipasi Pasif:** Masyarakat umum diberikan data tentang apa yang telah dipilih dan apa yang telah terjadi. Para pemimpin menyampaikan data tanpa memperhatikan reaksi masyarakat sehingga data hanya berjalan satu arah.
3. **Partisipasi Konsultatif:** Masyarakat umum mengambil bagian dengan menanggapi beberapa pertanyaan. Dampak dari respon tersebut kemudian dibedah oleh pihak luar untuk mengidentifikasi permasalahan dan cara mengatasi permasalahan tanpa mengingat sudut pandang masyarakat setempat agar lebih mendalam.

Menurut Arnstein (dalam Panudju, 1999:25), tingkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dibagi menjadi 8 tingkatan, dari yang bersifat non-partisipasi sampai pada kekuasaan warga. Berikut adalah penjelasan untuk setiap tingkatan:

1. **Manipulation atau manipulasi:** Ini adalah tingkat kerjasama yang paling minimal dimana warga setempat dimanfaatkan secara eksklusif atas nama individu dalam badan peringatan yang berbeda. Masyarakat hanya disalahgunakan oleh penguasa sebagai publikasi pada tingkat ini tanpa adanya peran yang nyata.

2. **Therapy atau terapi:** Pada tingkat ini, sambil berpura-pura melibatkan kerja sama lokal dalam perencanaan, pencetusnya berurusan dengan individu lokal seperti pasien yang sedang memulihkan diri dalam pengobatan. Latihan lebih bertujuan untuk menyesuaikan mentalitas individu dibandingkan mendapatkan masukan darinya.
3. **Informing atau pemberian informasi:** Tingkat ini mencakup pemberian data kepada masyarakat secara umum tentang kebebasan, kewajiban, dan pilihannya. Data diberikan secara sepihak dari para ahli kepada individu tanpa adanya kesempatan untuk memberikan kritik.
4. **Consultation atau konsultasi:** Bertujuan untuk mengundang opini masyarakat setelah mereka diberi informasi. Tingkat keberhasilannya rendah karena tidak ada jaminan bahwa kepentingan dan pemikiran individu akan dipertimbangkan.
5. **Placation atau perujukan:** Pada tingkat ini, masyarakat mulai memberikan dampak, meskipun dalam permasalahan lain tidak sepenuhnya diselesaikan oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Beberapa masyarakat lokal dikenang sebagai anggota badan kolaborasi peningkatan pertemuan lokal.
6. **Partnership atau kemitraan:** Pada tingkatan ini, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara masyarakat dengan pihak penguasa. Pembagian tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan, dan pemecahan berbagai permasalahan disepakati bersama.
7. **Delegated power atau pelimpahan kekuasaan:** Masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana atau program tertentu. Masyarakat berhak menentukan program-program yang bermanfaat bagi mereka.
8. **Citizen control atau masyarakat yang mengontrol:** Masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Masyarakat memiliki kewenangan dan dapat melakukan negosiasi langsung dengan pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Dalam hal ini, usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman dana tanpa melalui pihak ketiga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena tujuannya adalah memperoleh gambaran sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di tingkat kelurahan. Pendekatan kualitatif lebih cocok untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan melibatkan interpretasi subjektif dari partisipan. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha memberikan gambaran yang akurat dan rinci tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan. Untuk memastikan kualitas penelitian, penelitian ini melibatkan metode wawancara dan pengkajian dokumen kelurahan Parung Jaya. Wawancara digunakan untuk mendapatkan pemahaman langsung dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait partisipasi dalam pembangunan. Sementara itu, pengkajian dokumen kelurahan dapat memberikan data historis, kebijakan, dan informasi terkait yang dapat mendukung analisis penelitian. Melalui kombinasi metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk memahami dan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap perencanaan alternatif program dilakukan dengan melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memberikan beberapa alternatif program. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni yang pertama, fokus perencanaan berdasarkan pada sosialisasi prosedur dan manfaat perencanaan musrenbang Kelurahan yang dihadapi masyarakat.

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan kelurahan Parung Jaya sangat penting dan juga sangat dibutuhkan karena masyarakatlah yang menentukan prioritas dari perencanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah kelurahan. pemerintah kelurahan merupakan wadah aspirasi masyarakat, sehingga tidak akan terlihat jelas peran pemerintah kelurahan seperti apa jika tidak ada partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan, dan program kebijakan Pemerintah tidak bisa berhasil dengan baik kalau tidak didukung dengan partisipasi masyarakat.

Evaluasi pada program pembangunan memang seharusnya dilakukan minimal setahun sekali, guna mengetahui perubahan pembangunan baik itu bersifat fisik maupun nonfisik. Kegiatan pemerintah Kelurahan Parung Jaya merupakan peran serta masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan yang memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah dibangun, melakukan pemeliharaan serta pemantauan baik dari pihak pemerintah Kelurahan sendiri maupun bersama pihak masyarakat yang ada di Kelurahan Parung Jaya. Pemberian masukan atau solusi terhadap masalah yang timbul dalam pembangunan kelurahan.

Tahap Assesment

Tahap assessment dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki. Untuk ini, masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi, sehingga hal tersebut merupakan pandangan mereka sendiri. Keterlibatan dalam perencanaan pembangunan masyarakat sangat penting dalam menunjang kelancaran pembangunan, dalam teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pembangunan bukan hanya dimulai pada saat rapat perencanaan ataupun pada implementasinya tetapi dalam hal ini, masyarakat seharusnya berpartisipasi pada saat pengidentifikasian masalah. Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan para informan didapati hasil bahwa perencanaan pembangunan di Kelurahan Parung Jaya sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan agar wilayah kelurahan Parung Jaya tidak tertinggal. Karena tujuan dari perencanaan ini sendiri yaitu untuk kemajuan wilayah Kelurahan Parung Jaya dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kelurahan Parung Jaya.

Dalam perencanaan pembangunan Kelurahan Parung Jaya banyak hal yang dibutuhkan untuk menunjang terlaksananya pembangunan wilayah Kelurahan Parung Jaya. Pada tahapan assessment data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan wilayah Kelurahan Parung Jaya menurut pengamatan penulis dilapangan, responden memberikan jawaban mengenai data- data yang dibutuhkan diantaranya hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kelurahan Parung Jaya, data- data yang dibutuhkan beragam seperti kondisi masyarakat, jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, keterjangkauan dan kebutuhan, data penduduk, potensi setiap RT, RW dan kelembagaan merupakan data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan wilayah Kelurahan Parung Jaya.

Perencanaan pembangunan pada masing-masing kelurahan merupakan bentuk tanggungjawab masing-masing kelurahan untuk menumbuhkan rasa peduli tentang program yang akan dilaksanakan di wilayah Kelurahan Parung Jaya, mereka demi tercapainya pembangunan di segala bidang, baik pembangunan bersifat fisik maupun bidang nonfisik. Masyarakat dibolehkan untuk ikut merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan Tingkat Kelurahan dan mereka harus bisa bertanggungjawab dengan program yang telah mereka ajukan dalam Musrenbang tingkat Kelurahan dan seterusnya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dapat kita ketahui bahwa masyarakat aktif berpartisipasi dalam proses pengumpulan data terkait dengan perencanaan pembangunan. Terkait dengan pernyataan dari Lurah, Kelurahan dan Tokoh Masyarakat seperti diatas dapat kita lihat bahwa partisipasi masyarakat di Kelurahan Parung Jaya terkesan sangat aktif, karena kesadarannya dari masing-masing individu, apalagi dengan gotong royong dan kebersamaan masih terjalin baik antarwarga, karena mereka lebih mementingkan kepentingan umum daripada urusannya masing-masing.

Tahap Perencanaan Alternatif Program

Tahap perencanaan alternatif program dilakukan dengan melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memberikan beberapa alternatif program. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni yang pertama, fokus perencanaan berdasarkan pada sosialisasi prosedur dan manfaat perencanaan musrenbang tingkat kelurahan yang dihadapi masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam keterlibatan dalam perencanaan pembangunan tingkat kelurahan. Ketiga, keterlibatan dalam perencanaan pembangunan tingkat kelurahan yaitu siapa saja yang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan tingkat kelurahan. Keempat, pemberian saran dan masukan dalam perencanaan pembangunan tingkat kelurahan.

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan tingkat kelurahan sangat penting dan juga sangat dibutuhkan karena masyarakatlah yang menentukan prioritas dari perencanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah kelurahan. Pemerintah kelurahan merupakan wadah aspirasi masyarakat, sehingga tidak akan terlihat jelas peran pemerintah kelurahan seperti apa jika tidak adanya partisipasi dari masyarakat sendiri dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan tanpa adanya partisipasi dari masyarakat dalam

kegiatan seperti rapat, maka program kebijakan pemerintah yang melalui pemerintah kelurahan tersebut tidak mungkin bisa bergerak, hal itu disebabkan tidak adanya masyarakat yang ikut berpartisipasi. Namun tujuan dari pemerintah kelurahan sendiri adalah untuk mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat yang ada. Untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai partisipasi masyarakat yang ikut dalam rapat yang diadakan pemerintah Kelurahan Parung Jaya, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan diantaranya Bapak Yanto, Tokoh Masyarakat selaku Tokoh Pemuda bisa dilihat bahwa beliau sering memberikan masukan dalam rapat yang diadakan pihak pemerintah kelurahan, tujuan beliau ikut pastinya supaya bisa mengusulkan apa-apa saja yang menjadi kegiatan prioritas yang akan dilakukan di Kelurahan Parung Jaya.

Tahap Pelaksanaan

Selanjutnya setelah tahap perencanaan adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya di lapangan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan merupakan keikutsertaan masyarakat untuk membantu baik berupa materi maupun non materi agar suatu pembangunan yang ingin dilakukan bisa terlaksana dengan baik dan cepat.

Adapun partisipasi masyarakat yang diharapkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan disini adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan berupa uang, bahan dan tenaga. Selanjutnya mengenai hubungan atau kerjasama pemerintah kelurahan dengan masyarakat di Kelurahan Parung Jaya dalam pelaksanaan pembangunan, hubungan atau kerjasama sangat dibutuhkan dan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan, karena memang pembangunan Kelurahan Parung Jaya disini sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab Masyarakat Kelurahan Parung Jaya.

Tidak bisa dipastikan juga bahwa jika masyarakat berpartisipasi dalam mempersiapkan suatu rencana pembangunan, maka dengan sendirinya masyarakat akan berpartisipasi dalam tahap-tahap berikutnya. Hal tersebut karena partisipasi pada tahap pelaksanaan ingin mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk itu partisipasi masyarakat didalam pelaksanaan pembangunan sangat menentukan keberhasilan dari suatu pembangunan, partisipasi masyarakat disini sangat dituntut lebih dalam segala hal, karena partisipasi didalam pelaksanaan pembangunan sangat berat, dimana masyarakat diharapkan mampu

memberikan partisipasi mereka seoptimal atau sebesar mungkin karena dalam pelaksanaan pembangunan membutuhkan partisipasi masyarakat yang lebih atau tenaga dari pembangunan guna memperlancar proses pelaksanaan pembangunan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Murdani, S.Ag, Lurah Parung Jaya dan beberapa warga masyarakat Kelurahan Parung Jaya dapat diketahui bahwa banyak program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat didalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Parung Jaya. Untuk menentukan keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Parung Jaya, masyarakat diharapkan bisa untuk meningkatkan bentuk partisipasi didalam pelaksanaan pembangunan baik berupa swadaya masyarakat, keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berlangsung atau tenaga dan sumbangan berupa bahan-bahan didalam pelaksanaan pembangunan guna menunjang kelancaran didalam pelaksanaan pembangunan, karena berhasil atau tidaknya suatu pembangunan di Kelurahan Parung Jaya ini sangat ditentukan dari partisipasi mereka sepenuhnya dan merupakan tanggung jawab masyarakat kelurahan Parung Jaya sepenuhnya.

Masyarakat Kelurahan Parung Jaya dibolehkan untuk ikut melaksanakan pembangunan dan mereka harus bisa bertanggungjawab dengan program yang telah mereka ajukan dalam Musrenbang tingkat Kelurahan dan seterusnya. Pada tahap pelaksanaan, hubungan masyarakat dengan pemerintah Kelurahan Parung Jaya terkait perencanaan pembangunan sangat baik, masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Parung Jaya, sehingga bisa dikatakan pemerintah berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Tahap Evaluasi

Evaluasi pada program pembangunan memang seharusnya dilakukan minimal setahun sekali, guna untuk mengetahui perubahan pembangunan baik itu bersifat fisik maupun nonfisik. Kegiatan pemerintah Kelurahan Parung Jaya merupakan peran serta masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan yang memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah dibangun, melakukan pemeliharaan serta pemantauan baik dari pihak pemerintah Kelurahan Parung Jaya sendiri maupun bersama pihak masyarakat yang ada di Kelurahan Parung Jaya. Memelihara pembangunan yang ada di Kelurahan merupakan hal yang sudah seharusnya dilakukan oleh masyarakat setempat agar pembangunang tersebut terawat dan tidak mudah rusak. Adapun pembangunan yang diberikan oleh pemerintah merupakan perwujudan dari

kebijakan pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan partisipasi dari masyarakat untuk menjaga dan memelihara pembangun yang sudah ada, maupun pembangunan yang masih dalam proses perncanaan. Pembangunan yang ada di Kelurahan Parung Jaya yang bisa masyarakat rasakan manfaatnya seperti fasilitas di pasar, perbaikan jalan lingkungan, Drainase, Pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Jika fasilitas ini bisa dijaga dan dirawat oleh masyarakat setempat, maka pembangunan akan bertahan dalam jangka panjang.

Pembangunan di Kelurahan Parung Jaya akan terwujud apabila ada kerjasama antara Lembaga bersangkutan dan masyarakat. Karena tugas pemerintah Kelurahan sendiri merupakan untuk mensejahterakan masyarakat dan tempat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Masalah pembangunan yang ada di Kelurahan Parung Jaya sendiri sudah mulai maksimal karena sudah mulai ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah kelurahan. Akan tetapi masih ada kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Partisipasi masyarakat yang diperlukan adalah mengikuti kegiatan pemerintah kelurahan seperti ikut bekerja baik itu dibidang fisik maupun nonfisik yang ada didaerah masing-masing.

Masyarakat yang ikut berperan dalam pelaksanaan pembangunan merupakan suatu hal yang memang sudah seharusnya terjadi. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan operasional pembangunan sangat membantu berjalannya program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan beserta masyarakat. Kerjasama antara masyarakat dan pihak pemerintah kelurahan yang sangat baik mampu memberikan kemajuan pembangunan yang ada di Kelurahan Parung Jaya. Adapun keberhasilan pembangunan merupakan tercapainya semua program-program yang sudah direncanakan oleh pihak pemerintah.

Program tidak akan bisa tercapai apabila tidak ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat, sehingga untuk mendapatkan pencapaian yang maksimal masyarakat harus bisa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan, baik itu yang bersifat tenaga, pikiran maupun materi. Agar apa yang dilakukan masyarakat dapat termonitoring dengan baik, dan bahkan untuk mengetahui sudah sampai dimana program pemerintah yang telah difasilitasi oleh pemerintah kelurahan tersebut.

Tahap evaluasi dilakukan dengan adanya partisipasi dari masyarakat dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Pada tahap ini, masyarakat ikut mengawasi dari laporan kegiatan dari segi program, waktu maupun dana yang digunakan. Evaluasi pada program

pembangunan memang seharusnya dilakukan minimal setahun sekali, guna untuk mengetahui perubahan pembangunan baik itu bersifat fisik maupun nonfisik. Kegiatan pemerintah kelurahan merupakan peran serta masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan yang memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah dibangun, melakukan pemeliharaan serta pemantauan baik dari pihak pemerintah kelurahan sendiri maupun bersama pihak masyarakat yang ada di Kelurahan Parung Jaya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahap evaluasi masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sudah sangat baik, mereka ikut memberikan informasi terkait dengan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan juga menikmati serta menjaga hasil-hasil pembangunan di Kelurahan Parung Jaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yaitu “Bagaimana proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan Parung Jaya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang berbasis partisipasi masyarakat?”, maka sesuai teori Partisipasi Masyarakat menurut Adisasmita, (2001:208), yaitu Tahap Assesment, Tahap Perencanaan Alternatif, Tahap Pelaksanaan Program dan Tahap Evaluasi, Untuk itu Kesimpulan dalam penelitian ini antara lain. Pada tahap assessment atau dalam pengidentifikasian masalah dilapangan, terlihat partisipasi masyarakat dapat dikatakan baik yakni masyarakat telah peka terhadap fenomena serta realita yang sedang terjadi disekitar mereka, bahkan telah memberikan masukan kepada pihak pemerintah akan hal tersebut. Pada tahap perencanaan alternative program atau kegiatan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kelurahan Parung Jaya, tidak langsung diputuskan secara sepihak saja oleh pemerintah Kelurahan Parung Jaya melainkan dengan melakukan penggalian gagasan yang mendalam dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan agar semua kebutuhan masyarakat dapat tertampung semua. Pada tahap pelaksanaan, hubungan masyarakat dengan pemerintah kelurahan terkait perencanaan pembangunan sangat baik, masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Parung Jaya, sehingga bisa dikatakan pemerintah berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada tahap evaluasi masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sudah sangat baik, mereka ikut memberikan informasi

terkait dengan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan juga menikmati serta menjaga hasil-hasil pembangunan Kelurahan Parung Jaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander, **Perencanaan Daerah Partisipatif**, Penerbit Pondok Edukasi: Solo, 2002.
- Adelman, Ira and C.T. Morris, **Development History and Its Implications for Development Theory**, World Development No.25, Oxford University Press: Oxford, 1997.
- Adisasmitha. 2016. **Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan**. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Adisasmitha, Rahardjo. 2006. **Membangun Desa Partisipasi**, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Adi, Isbandi Rukminto, **Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)**, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta, 2001.
- Bappenas, **Pedoman Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2005**
Bappenas: Jakarta, 2005.
- Bratakusumah, D. S., dan Dadang Solihin, **Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2001.
- Conyers, Diana, **Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga : Suatu Pengantar**, Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 1991.
- Das Gupta, M., Grandvoinet, H. and Romani, M. 2003, **Fostering Community-Driven Development : What Role For The State?** World Bank Policy Research Working Paper No.2969, World Bank, Washington DC.
- Dwiyanto, Agus, **Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia**, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, 2002.
- , **Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik**, GadjahMada University Press: Yogyakarta, 2006.
- Easterly, Wilian, **The Ideology of Development**, Foreign Policy, July/Augustus 2007.
- Fitriastuti, Nurwimayasri, **Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Tengah, (Studi Optimalisasi Fungsi DPRD)**, Tesis Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro: Semarang, 2005.
- Hadi, Sudarto, **Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan**, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 2001.
- Handayani, Suci, **Pelibatan Masyarakat ...rjinal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif**, KOMPIP: Solo, 2006.
- Handoko, Tani, **Manajemen**, Edisi Keenam, Fakultas Ekonomi Universitas GadjahMada: Yogyakarta, 2003.
- Irwan, Abdullah, **Jurnal Ilmu Sosial Transformatif**, Media Wacana: Yogyakarta, 1999.
- Kartasasmitha, Ginanjar, **Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat**, Bappenas, 1996.
- Khairudin, **Pembangunan Masyarakat, Tinjauan Aspek Sosiologis , Ekonomi dan Perencanaan**, Liberty: Yogyakarta, 1992.
- Kuncoro, Mudradjad, **Otonomi dan Pembangunan Derah**, PT.Erlangga: Jakarta, 2004.
- Kunarjo, **Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan**, Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta, 2002.

- Komarudin, **Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman Jakarta**, Yayasan Realestat Indonesia - PT Rakasindo: Jakarta, 1997.
- Mahmud, S., 2001, ***Making Rights Real in Bangladesh Through Collective Action***, http://www.bids-bd.org/Making_Rights_Real_in_Bangladesh.pdf.
- Marshall, Graham R., ***Participative Planning and Informal Self-Government of Agri Environmental Conflicts : Lesson from a Survey Of Australian Farmers Facing Irrigation Salinity***, 7^t Ulvon Conference on Environmental Economics, June 2000, Ulvon, Sweden.
- Meinzen-Dick, R., and Knox, A., ***Collective Action, Proerty Rights and Devolution of Natural Management: a Conceptual Paper***, Exchange of Knowledge and Implication for Policy, June 1999.
- Mikkelsen, Britha, **Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan** Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 1999.
- Moeljarto, Tjokrowinoto, **Politik Pembangunan : Sebuah Analisa Konsep, Arah dan Strategi**, PT. Tiara Wacana: Yogyakarta, 1994.
- Moleong, Lexy, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT. Remaja Rosada Karya: Bandung, 2006.
- Mubiyarto, **Pembangunan Pedesaan**, P3PK Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, 1984.
- Panudju, Bambang, **Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah**, Penerbit Alumni: Bandung, 1999.
- Platteau, J.P., 2004, ***Monitoring Elite Capture in Community Driven Development***, Development and Change, 35(2), 223-246.
- Riyadi, Bratakusumah, D.S., **Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah**, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2014.
- Sasono Adi, **Menjadi Tuan di Negeri Sendiri**, Penerbit Grafindo: Jakarta, 2013.
- Sastropoetro, Santoso, R.A., **Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional**, Alumni: Bandung, 2018.
- Siagian, Sondang, **Administrasi Pembangunan**, Gunung Agung: Jakarta, 1994. Slamet, Y., **Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi**, Sebelas Maret University Press: Surakarta, 1994.
- Sugihartono, A.D., **Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Solo: Pendekatan Pembangunan Ngewongke Uwong**, IPGI Solo, 2003.
- Sugiyono, **Metode Penelitian Administrasi**, CV. Alfabeta: Bandung, 2003
- Supriatna, Tjahya, **Strategi Pembangunan dan Kemiskinan**, Rineka Cipta: Jakarta, 2000.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, **Perencanaan Pembangunan**, Cetakan Kelima, Penerbit PT Toko Gunung Agung: Jakarta, 1996.
- , **Pengantar Administrasi Pembangunan**, Cetakan Ketujuh Belas, Penerbit PT Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta, 1995.
- Todaro, Michael, **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**, Erlangga: Jakarta, 2000.
- United Nations Development Programme (UNDP), ***Human Development Report***, Oxford University Press-Oxford : New York, 2003.
- Wibisana, Gunawan, **Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Peremajaan Pasar**, Institut Teknologi Bandung: Bandung, 1989.
- Wijaya, Rina, **Forum Pengambilan Keputusan dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kelurahan Jebres Kecamatan**

Jebres Kota Surakarta), Tesis Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, 2001.

Wrihatnolo, R.R., dan Nugroho, R.D., **Manajemen Pembangunan Indonesia : Sebuah Pengantar dan Panduan**, PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2006.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Ngoedijo, Widjono, Isu-Isu Utama Perspektif Peningkatan Mutu Musrenbang di Masa Depan. *Jurnal Local Governance Support Program*. Edisi Juli, 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0295 / M.PPN / 1 / 2005 dan 050 / 166 / SJ tertanggal 20 Januari 2005 tentang Petunjuk Teknis Musrenbang.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/ii/bangda/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.